

KEBUDAYAAN SEBAGAI PEREKAT PERSATUAN BANGSA

Hamengku Buwono X*)

Berbicara tentang "Kebudayaan sebagai Perekat Persatuan Bangsa", berarti kita harus mengkaji ulang terlebih dahulu tentang kebudayaan nasional. Karena selama ini persepsi kita terlanjur memposisikan kebudayaan nasional sebagai wahana perekat persatuan dan kesatuan bangsa, yang kini rupanya banyak dipertanyakan kembali eksistensi dan perannya.

Konsep kebudayaan nasional Indonesia telah menjadi bahan pemikiran dan diskusi para cendekiawan Indonesia dalam forum Polemik Kebudayaan di tahun 30-an. Di tahun 80-an di era yang sudah jauh berbeda, Alisjahbana dan Koentjaraningrat membangun suatu wacana kebudayaan yang membuat kita semakin memiliki wawasan, betapa luasnya (dan juga betapa relatifnya) tentang hakikat kebudayaan.

Koentjaraningrat mengemukakan tentang dua fungsi dari kebudayaan nasional Indonesia¹, yaitu sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang (1) yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia dan (2) yang dapat dipakai oleh semua

warga negara Indonesia yang bhinneka, untuk saling berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas.

Dalam fungsi pemberi identitas, suatu unsur kebudayaan dapat menjadi unsur kebudayaan Indonesia, apabila paling sedikit memenuhi dua syarat, yaitu harus merupakan hasil karya warga setempat, berupa (1) tema berpikir atau wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia, dan (2) oleh sebanyak mungkin warga negara Indonesia lainnya dinilai sedemikian tingginya, sehingga dapat menjadi kebanggaan mereka semua, dan dengan demikian mereka mau mengidentifikasi diri dengan unsur kebudayaan itu.

Sementara dalam fungsi mem-

*) Sri Sultan Hamengku Buwono X Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 1984, Yogyakarta

1 Koentjaraningrat, "Persepsi tentang Kebudayaan Nasional", Makalah Seminar "Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan", dibukukan dengan editor Alfian, LIPI, Jakarta 1982.

perkuat solidaritas, apabila unsur itu sedikitnya juga memiliki dua syarat: berciri khas Indonesia, dan menjadi "gagasan kolektif" sebagai wahana komunikasi untuk menumbuhkan saling pengertian serta mempertinggi rasa solidaritas bangsa. Sebagai contoh, ideologi Pancasila dan bahasa Indonesia dapat dikatakan berfungsi ganda, baik sebagai identitas nasional maupun pengikat solidaritas bangsa Indonesia dalam memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan.

Pandangan ini mendapat tanggapan kritis dari Sutan Takdir Alisjahbana melalui pembahasannya dalam Seminar tersebut. Menurutnya kebudayaan nasional tidak sekadar pemberi identitas, memperkuat solidaritas dan kebanggaan terhadap masa lalu yang bersifat eksklusif saja, tetapi kebudayaan nasional harus menjadi penjelmaan sifat progresif kebudayaan modern, yang dikuasai oleh ilmu dan ekonomi yang melahirkan teknologi dan berpusat pada universitas, bank dan pabrik.

Jika bangsa Indonesia ingin dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain, tak dapat tidak harus mengubah mentalitas dan etikanya, yaitu menyesuaikan diri dengan kebudayaan modern itu. Artinya, harus bera-

ni mengubah orientasi budaya, dari aspek ekspresif yang bersifat kosmetik ke aspek progresif yang rasional.

Semangat persatuan-kesatuan yang dijiwai oleh Pancasila adalah nilai normatif yang telah diperjuangkan melalui *nation and character building* oleh para pendiri bangsa. Proses itu harus kita lanjutkan dan kembangkan serta tidak boleh terhenti sejak kita memutuskan membangun negara kesatuan Republik Indonesia merdeka dengan tonggak-tonggak sejarah Soempah Pemoeda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Sejak awal mula para pemimpin bangsa ini sepenuhnya mengalami dan menyadari, bahwa membentuk satu negara Republik Indonesia yang berkepu-lauan dan melingkari katullistiwa Nusantara ini memerlukan satu visi yang jauh ke depan melampaui batas-batas keanekaragaman tata-nilai yang dimiliki oleh suku-suku bangsa kita.

Maka, *platform* pertama dan utama yang diajukan oleh Bung Karno adalah²: (1) tekad untuk hidup bersama (*le disere d'etre ensemble, Ernest Renan*), (2) membentuk satu bangsa berdasarkan kesamaan ciri oleh sebab kesamaan nasib (*Eine Nation ist eine aus Schicksals gemeinschaft er-*

2 K. Sindhunata, S.H., *Pokok-pokok Kesatuan dan Persatuan Bangsa sebagai Landasan Bersama Gerakan Reformasi*, Semiloka KAGAMA, Yogyakarta, 12-13 Agustus 1998

wachsene Character gemeinschaft, Otto Bauer), dan (3) secara geopolitik tanah air Indonesia adalah suatu negara-bangsa (*nation-state*).

Namun, sebagai bangsa yang relatif muda yang harus berjuang dengan berbagai masalah kebutuhan primer ekonomi, sosial-budaya dan politik yang mengancam eksistensinya, bangsa Indonesia belum menghasilkan karya-karya besar baru yang dapat dijadikan kebanggaan dan identitas nasional guna membina hari depan. Maka tidaklah mengherankan, bahwa untuk keperluan itu bangsa Indonesia seringkali menengok ke kejayaan masa lalu.

Bunga-rampai Kebudayaan Nasional

Pedebatan mengenai dua *mainstream* pemikiran tentang kebudayaan nasional ini memang terus berlanjut. Seperti yang mencuat kembali sejak Indonesia dilanda krisis, misalnya dalam suatu Forum Dialog Nasional Kebudayaan pada Maret 2000 lalu³.

Kita Belum Memiliki Kebudayaan Nasional?

Dalam forum itu Prof. Dr. M.

Junus Melalatoa, guru besar antropologi UI, mempertanyakan kembali keberadaan sosok kebudayaan nasional Indonesia sekarang ini. Menurutnya Indonesia belum mempunyai kebudayaan nasional yang bersemi dan hidup di hati-sanubari rakyat Indonesia. Buktinya, sampai sekarang belum ada sistem budaya yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman perilaku bersama untuk seluruh aspek kehidupan warga negara. Akibat ketiadaan acuan bersama itu, tidak aneh bila di Indonesia mudah terjadi guncangan, seperti krisis yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Namun, Prof. Dr. Edi Sedyawati, mantan Dirjen Kebudayaan, berpendapat sebaliknya, bahwa kurang tepat jika dikatakan Indonesia tidak memiliki kebudayaan nasional. Sesungguhnya, yang belum terlihat itu adalah kesan terhadap keutuhan sosok kebudayaan Indonesia. Sebagai contoh, apakah sistem nilai yang sudah dirumuskan para pendahulu bangsa, seperti Sumpah Pemuda, Proklamasi, Indonesia Raya dan Pancasila misalnya, tidak cukup dijadikan acuan bagi masyarakat? Kalau pun ada penyimpangan dan belum bisa diterapkan secara utuh, itu urusan lain, karena dalam

3 Dialog Nasional Kebudayaan, diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se Indonesia di Kampus UI Depok, Jakarta, 13 Maret 2000.

sistem nilai di mana pun selalu ada yang namanya penyimpangan.

Penilaian ini ada benarnya, jika mengacu padapendapat Koentjaraningrat, bahwa baik Sumpah Pemuda, Proklamasi, Indonesia Raya maupun Pancasila sebagai bagian dari Kebudayaan Nasional, adalah sistem-gagasan yang bersungsi memberi identitas dan memperkuat soidaritas yang berciri khas Indonesia serta merupakan sesuatu yang pantas dibanggakan. Namun jika menggunakan analisis Sutan Takdir - yang berorientasi progresif- boleh dikatakan, bahwa kita belum memiliki kebudayaan nasional yang mantap.

Prof. Sedyawati melihat, bahwa puncak kebudayaan nasional merupakan sesuatu yang berasal dari daerah tertentu, tetapi dapat diterima oleh daerah lain. Misalnya saja makanan Padang yang bisa diterima di banyak daerah. Kalau kita melihat puncak-puncak budaya sebagai kesamaan nilai, memang diakui belum bisa tampil secara menyeluruh. Untuk itu masih dibutuhkan waktu beberapa generasi lagi.

Dalam hal ini, kita lalu teringat pada konsep Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan, bahwa kebudayaan nasional adalah "puncak-puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah". Ki Hadjar tampaknya memasuk-

kan aspek mutu ke dalam konsepnya, karena dengan metafora "puncak", yang dimaksudkan adalah unsur-unsur dari kebudayaan daerah yang paling tinggi mutunya.

Koentjaraningrat misalnya mencontohkan, bahwa orang Batak Karo yang tinggal di Kabanjahe pun sebaiknya mengakui orang-orang yang dalam abad ke-9 tinggal di lembah gunung Merapi sebagai nenek-monyang mereka, walaupun orang-orang zaman dahulu tersebut belum berjiwa nasion Indonesia. hal ini dimaksudkan, agar orang Batak Karo pun dapat turut bangga memiliki candi Borobudur hasil ciptaan orang-orang di lembah Merapi tadi.

Memang konsep "puncak" ini menjadi perdebatan hangat lagi di berbagai forum kebudayaan, di mana antara lain Prof. Dr. Umar Khayam pun kurang sependapat, karena tidak adanya kesejajaran kebudayaan di antara suku-suku bangsa Indonesia yang demikian plural ini, khususnya antara masyarakat yang memiliki tradisi kerajaan dan masyarakat terisolasi yang jauh dari pengaruh kebudayaan luar.

Sebuah Rekayasa Budaya

Sebelumnya, di sebuah forum dengan tema "Ke-Indonesiaan dalam Perspektif Kebudayaan"

pada Maret 1999 yang lalu⁴, istilah "kebudayaan nasional" juga digugat, sebab sifat yang tak netral dan lebih merupakan sebuah ideologi politik daripada kenyataan empirik, dengan memutlakkan gagasan tertentu yang tidak mengacu pada konsep-konsep budaya. Bahkan pada praktiknya, sering dipakai alat politik memasung benih-benih pertumbuhan energi-energi lokal (*local genius*). Kesemuanya itu dilakukan dalam konteks represi melalui rekayasa budaya, oleh sebab dua alasan penting.

Pertama, untuk menjamin kepastian, bahwa loyalitas daerah — seperti tercermin dalam "kebudayaan daerah" — tidak mengancam persatuan nasional, serta jangan menjadikan perbedaan dan keragaman mengarah pada desintegrasi bangsa. Kedua, kebudayaan sengaja dipersepsi untuk menciptakan kondisi yang kondusif demi melancarkan pertumbuhan ekonomi dan teknologi, sebuah slogan lain yang juga sering didengungkan.

Karena itu, istilah "kebudayaan nasional" dianggap sama sekali tak relevan untuk mencermati fenomena pluralisme budaya di Indonesia. Pada sisi lain, kita bisa menyaksikan sebuah "tragedi budaya", bagaimana rezim itu sendiri sebenarnya me-

rupakan contoh nyata rekayasa sebuah "kebudayaan nasional" yang dilakukan lewat proses politik kekerasan dan mekanisme psikis. "Kebudayaan nasional" dibangun secara sistemik (menggunakan sistem tertentu dan teratur) melalui jalur-jalur birokrasi, tanpa disadari telah merepresi daya kritis masyarakat dan memasung pluralisme perspektif (cara berpikir) demi menjaga apa yang disebut stabilitas pembangunan.

Selain itu, juga mereduksi pengertian kebudayaan sebatas kesenian, yang sebenarnya hanya merupakan aspek luar dan sebagian kecil dari "isi" kebudayaan yang begitu luas dan dalam. Fenomena ini tampak dengan keberadaan Ditjen Kebudayaan yang lebih banyak mengurus hal-hal yang sifatnya arkeologis dan historis, terutama yang berhubungan dengan kesenian.

Sebenarnya selain pemerintah, ada dua "aktor" lain yang tak jarang ikut bermain "menggarap" energi-energi lokal — semacam rekayasa budaya oleh lembaga agama dan gelombang komersialisasi. Otoritas agama bisa dengan mudah menginfiltrasi ke dalam urusan budaya, ketika para pemuka agama ikut menentukan muatan moral kesenian rakyat. Semen-

4 Forum Indonesia Muda (FIM), tema "Ke-Indonesiaan dalam Perspektif Kebudayaan", Diskusi Rutin Kompas, Jakarta, 12 Maret 1999.

tara gelombang komersialisasi sebagai "anak kandung" modernisasi menjadikan bentuk kesenian lokal kehilangan rohnya, ketika energi-energi lokal itu tercerabut dari akarnya. Sehingga akhirnya, yang muncul kemudian adalah etalase-etalase seni yang sudah kehilangan roh berupa *instant arts*.

Maka, yang diperlukan sekarang adalah ditumbuhkannya pusat-pusat kebudayaan baru di berbagai kawasan yang potensi budayanya kuat dan beragam guna lebih memperkaya khasanah budaya bangsa.

Mempertanyakan Kembali Jati Diri

Samuel P. Huntington dalam buku *"The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order"* menyatakan, bahwa selama beberapa dekade terakhir ini tiga kecenderungan utama telah terjadi di dunia. Pertama, yang paling mendasar adalah fenomena globalisasi. Kedua, meningkatnya kesadaran identitas etnis, kultural dan agama. Ketiga, terjadi transisi dari rezim yang otoritarian ke sistem politik demokrasi.

Bertolak dari asumsi itu, di seluruh dunia masyarakat mulai mempertanyakan, mempertimbangkan dan menguraikan kembali kesamaan apa yang dimiliki dan apa yang membedakan

mereka dengan masyarakat lain. "Siapakah kita? Di manakah kami berasal? Krisis jati diri nasional menjadi suatu gejala global," demikian analisis Huntington.

Modernisasi, perkembangan ekonomi, urbanisasi dan globalisasi telah mendorong masyarakat untuk memperkecil jati diri mereka dan menguraikannya kembali dengan pengertian kemasyarakatan yang lebih sempit dan intim. Jati diri subnasional etnis, kamunal, dan jati diri regional diutamakan daripada jati diri nasional yang lebih luas. Di antaranya, pergerakan-pergerakan atas nama bangsa-bangsa Quebec, Scot, Basque, Corsica, Kurdi, Kosovo, Chchnya, Palestina, Tibet, Mindanao Muslim, Sudan Kristen, Tamil, dan lain-lain.

Akan tetapi, penyempitan jati diri ini disamai pada tingkatan yang lain oleh perluasan jati diri, karena masyarakat semakin banyak berinteraksi dengan bangsa lain yang memiliki adat-istiadat dan peradaban yang berbeda. Pada saat yang bersamaan — melalui teknologi informasi dan sarana komunikasi modern — masyarakat "dipaksa" mengasosiasikan diri dengan masyarakat global.

Selain itu, sekarang ini muncul fenomena banyaknya kecacauan yang terjadi akibat bentu-

ran peradaban-peradaban. Di dunia kontemporer, ada tiga tipe benturan kekerasan antarperadaban. Pertama, perang antara *major state* dengan peradaban lain. Seperti Israel dan Arab, India dan Pakistan, atau juga Yunani dengan Turki. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah kekuatan regional yang utama, sementara Australia berada di tempat kedua. Adalah wajar, jika konflik kepentingan secara natural juga berkembang antara Indonesia dan Australia, terutama dalam kasus Timor Timur.

Tipe kedua adalah kekerasan antarperadaban. Seperti masyarakat Hindu dan Muslim di India, juga kekerasan antara masyarakat Muslim dan Kristen di Ambon dan Lombok. Tipe ketiga adalah kekerasan yang muncul dari gerakan-gerakan etnis, kultural, dan regional yang meminta otonomi politik atau kemerdekaan dari sebuah negara, seperti Aceh dan Irian Jaya.

Untuk mengatasi benturan peradaban-peradaban itu, kini kita harus belajar hidup dalam sebuah dunia yang multiperadaban, dengan belajar menerima perbedaan serta dengan distribusi kekuasaan yang luas di antara masyarakat dan negara⁵.

Gerakan Etnosentris

Gencarnya gerakan etnosentris untuk "kembali ke etnisitas" yang tampil di panggung politik Indonesia akhir-akhir ini telah dipandang mengancam desintegrasi bangsa. Dari segi bagaimana eksistensi etnisitas itu ditampilkan bisa kita bedakan tiga kategori⁶ yang sejalan dengan teori Huntington.

Pertama, tuntutan pengakuan identitas etnis dalam wujud negara merdeka (*ethnonationalism*), seperti yang disuarakan oleh Irian Jaya, Aceh atau Timor Timur. Kedua, keinginan mempertahankan identitas etnis dan agama antarkelompok (konflik horisontal) seperti di Ambon, Halmahera, Poso, Sambas, Nusa Tenggara Timur. Ketiga, perjuangan perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap eksplorasi sumber daya alam sekitarnya, misalnya di Riau dan Kalimantan Timur. Dengan demikian karakteristik-karakteristik dari masing-masing konflik etnis, kita bisa menelaah bervariasinya sumber desintegrasi bangsa.

Fenomena etnosentris ini bukanlah sesuatu yang negatif. Indonesia tidak sendirian terlanda arus ketidakpuasan etnis ini. Tuntutan otonomi etnis di belah-



5 Samuel P. Huntington, "The Struggle for Indonesia", Konferensi oleh *Strategic Intelligence*, Jakarta, 24 Mei 2000.

6 Rebeka Harsono, "Cultural Studies, Nasionalisme dan Etnisitas", Rubrik Pendidikan & Kebudayaan, Kompas, 1 Desember 2000.

an dunia saat ini umumnya didasarkan pada alasan tidak adanya pengakuan atas *cultural distinctiveness* dan survivalitas ekonomi kelompok. Kenyataan global ini menunjukkan bahwa kebudayaan tradisional tidak bisa begitu saja dipunahkan, misalnya lewat UU Nomor 5 Tahun 1979 yang mengganti lembaga-lembaga adat dengan perangkat-perangkat uniform dalam lembaga desa.

Lebih spesifik untuk konteks Indonesia, tidak adanya pengakuan terhadap budaya etnis, disebabkan oleh pembangunan yang berorientasi pada kapitalisme telah memarginalisasi perekonomian "rakyat" etnis. Selama Orba distribusi dan penataan ekonomi desa-kota, penduduk asli-pendatang, sektor tradisional-industri, dan mayoritas-minoritas tidak seimbang.

Pada kategori satu dan tiga, reaksi mengcounter eksploitasi kapitalisme terhadap sumberdaya alam kelompok etnisnya telah berubah menjadi gerakan politik yang efektif. Biasanya hal ini ditandai dengan mobilisasi simbol-simbol etnis dan agama untuk memperoleh dukungan anggota-anggota masyarakat.

Pada kategori kedua, konflik etnis agama sebenarnya terjadi di balik alasan-alasan persaingan kekuasaan dan ekonomi antara kelompok minoritas dan mayori-

tas. Hanya saja, karena adanya kekuatan *status quo* yang besar di balik konflik tersebut, konflik yang seharusnya diarahkan pada Pemerintah Orba (konflik vertikal), dengan cerdas dibalik menjadi konflik horisontal. Ini bisa terjadi, dikarenakan klaim keetnisan pada kategori-kategori kedua ini belum menjadi gerakan politik.

Sebaliknya "konflik-buatan" mencerminkan kelompok yang bertikai dijadikan korban politik kekuatan *status quo* yang tidak menghendaki adanya reformasi. Namun, meski disadari oleh pihak yang bertikai, dalam realitanya konflik terus berjalan, dengan adanya usaha-usaha untuk menggelembungkan rasa permusuhan dengan menaikkan simbol-simbol etnis dan agama untuk memperoleh dukungan politik. Klaim-klaim keetnisan yang instrumental ini berubah menjadi destruktif, padahal bila mobilisasi identitas etnis ini dilakukan secara terarah, aspirasi keetnisan bisa menjadi gerakan yang konstruktif.

Di samping ketiga kategori etnisitas di atas, perlu ditambahkan kategori etnis mayoritas. Kategori etnisitas keempat ini dicetuskan oleh Thomas Hylland Ericksen (1993). Kelompok mayoritas seringkali dikonotasikan sebagai kelompok yang direpresentasikan dalam simbol-sim-

bol nasionalisme suatu bangsa, karena dia merupakan kelompok dominan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kalangan mayoritas juga tereksplotasi oleh kelompok minoritas yang berkuasa atau *the exclusive-majority*.

Pengkategorian di atas pada intinya menunjukkan, bahwa problem-problem pembangunan sebenarnya muncul dari hubungan etnis yang berbeda-beda konteksnya. Oleh karena itu, penanganan masalah pembangunan perlu ditelaah dari *entry-point* yang berbeda-beda sesuai dengan ruang materilnya. Konflik etnis sebagai luapan ketidakpuasan pembangunan selama ini, seharusnya dihadapi dan dikelola oleh negara, bukan sebaliknya dianggap sebagai penghambat integrasi bangsa.

Padahal, sesungguhnya "kebangkitan etnis" merupakan keniscayaan yang disebabkan oleh berakhirnya periode negara-bangsa dan budaya nasionalisme. Dalam usaha mencari solusinya, dapat diketengahkan usulan moderat, bahwa negara Indonesia perlu mensolidkan kembali hubungannya dengan unsur-unsur pembentuknya, dan pihak etnis perlu lebih terbuka pada nilai-nilai dari luar kelompok etnisnya, agar bisa menjadi entitas yang dinamis.

Nasionalisme sebagai Konsep Budaya

Merujuk tulisan Rebeka, Gellner dalam bukunya *Nations and Nationalism* (1983), menerangkan bahwa pembentukan negara-negara melibatkan unsur kekuasaan, pendidikan dan kebudayaan. Kekuasaan politik menghomogenkan keunikan budaya. Misalnya, memobilisasi perasaan "memiliki bersama" lagu-lagu tradisional etnis lain sebagai milik nasional. Untuk bisa pada kesadaran itu peranan intelektual dalam "mendidik" masyarakat awam memainkan peranan kunci.

Budaya nasionalisme inilah yang disebut Gellner sebagai produk peradaban umat manusia yang tak terelakkan ditemukan pada abad pertengahan itu. Nasionalisme hanya bisa menjadi bagian kebudayaan orang-orang bila mereka berpendidikan. Tanpa sistem pendidikan tidak bisa ditransformasi sistem nilai yang modern, di mana masyarakat pertanian-tradisional dirombak menjadi budaya industri modern.

Gellner menganggap nasionalisme berfungsi sebagai "penanda" akan lahirnya budaya kompleks. Nasionalisme ialah yang menciptakan sistem politik, bukan dia yang diciptakan oleh sistem negara-bangsa. Demikianlah dalam teori Gellner ini, na-

bol nasionalisme suatu bangsa, karena dia merupakan kelompok dominan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kalangan mayoritas juga tereksplorasi oleh kelompok minoritas yang berkuasa atau *the exclusive-majority*.

Pengkategorian di atas pada intinya menunjukkan, bahwa problem-problem pembangunan sebenarnya muncul dari hubungan etnis yang berbeda-beda konteksnya. Oleh karena itu, penanganan masalah pembangunan perlu ditelaah dari *entry-point* yang berbeda-beda sesuai dengan ruang materilnya. Konflik etnis sebagai luapan ketidakpuasan pembangunan selama ini, seharusnya dihadapi dan dikelola oleh negara, bukan sebaliknya dianggap sebagai penghambat integrasi bangsa.

Padahal, sesungguhnya "kebangkitan etnis" merupakan keniscayaan yang disebabkan oleh berakhirnya periode negara-bangsa dan budaya nasionalisme. Dalam usaha mencari solusinya, dapat diketengahkan usulan moderat, bahwa negara Indonesia perlu mensolidkan kembali hubungannya dengan unsur-unsur pembentuknya, dan pihak etnis perlu lebih terbuka pada nilai-nilai dari luar kelompok etnisnya, agar bisa menjadi entitas yang dinamis.

Nasionalisme sebagai Konsep Budaya

Merujuk tulisan Rebeka, Gellner dalam bukunya *Nations and Nationalism* (1983), menerangkan bahwa pembentukan negara-negara melibatkan unsur kekuasaan, pendidikan dan kebudayaan. Kekuasaan politik menghomogenkan keunikan budaya. Misalnya, memobilisasi perasaan "memiliki bersama" lagu-lagu tradisional etnis lain sebagai milik nasional. Untuk bisa pada kesadaran itu peranan intelektual dalam "mendidik" masyarakat awam memainkan peranan kunci.

Budaya nasionalisme inilah yang disebut Gellner sebagai produk peradaban umat manusia yang tak terelakkan ditemukan pada abad pertengahan itu. Nasionalisme hanya bisa menjadi bagian kebudayaan orang-orang bila mereka berpendidikan. Tanpa sistem pendidikan tidak bisa ditransformasi sistem nilai yang modern, di mana masyarakat pertanian-tradisional dirombak menjadi budaya industri modern.

Gellner menganggap nasionalisme berfungsi sebagai "penanda" akan lahirnya budaya kompleks. Nasionalismelah yang menciptakan sistem politik, bukan dia yang diciptakan oleh sistem negara-bangsa. Demikianlah dalam teori Gellner ini, na-

sionalisme lebih merupakan konsep budaya ketimbang konsep politik, artinya sistem politik dibentuk demi melestarikan nilai-nilai kebudayaan tertentu.

Namun di abad ke-21 ini, eksistensi negara-negara semakin memudar. Bila kita menggunakan kerangka berpikir Gellner ini, bisa kita katakan budaya nasionalisme tertantang oleh kebangkitan etnisitas karena sistem negara-bangsa tidak kunjung membawa "kebebasan" bagi masyarakat etnis.

Koordinat Budaya Kita

Selama ini masalah peradaban kurang menjadi perhatian kita, sampai saatnya kita terben- tur dan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang meng-ancam. Hari ini kita rasakan bahwa sedang terjadi ancaman des- integrasi nilai-nilai dasar yang menjadi tumpuan peradaban bangsa. Kita patut risau, karena desintegrasi peradaban bangsa pada dasarnya adalah awal per- jalanan menuju desintegrasi bangsa itu sendiri. Karena tanpa peradaban, tak akan ada bangsa.⁷

Sekelompok manusia Indone- sia yang hidup bersama karena keterikatan jenis, yakni semata- mata karena persamaan naluri- ah untuk memepertahankan dan

mengembangkan jenis, hidup tidak berbeda dari sekelompok hewan yang terikat oleh dorong- an naluri untuk makan, berbi- ak, dan bertahan hidup. Manu- sia itu barulah dapat hidup lebih tinggi sebagai sebuah kesatuan bangsa, apabila terikat oleh per- adaban yang dilandasi nilai-nilai spiritual, moral, dan ideologis.

Kehidupan yang beradab ti- dak bersifat alamiah, tidak seper- ti kehidupan kera yang tidak memerlukan sekolah untuk me- lompat dari dahan ke dahan, dan juga tidak seperti pohon yang tumbuh kemudian mati pada waktunya. Kehidupan yang beradab adalah kehidupan yang hanya terdapat di dalam kehidupan manusia, tetapi itu pun tidak terjadi dengan sendi- rinya. Peradaban harus didesain dengan kesadaran, kesengajaan, kebersamaan, dan *commitment*, yang didasarkan atas nilai-nilai kehidupan yang luhur.

Dalam fakta yang tidak dapat dibantah, tidak boleh kita lupa- kan, bahwa Indonesia sebenar- nya memiliki semua syarat dan sifat untuk tidak bersatu. Ini se- buah keberhasilan perjuangan. Selama lebih dari setengah abad sejak kemerdekaan, yang kita kenal hanya satu bangsa dan satu ideologi, yang terkadang darah dan nyawa taruhannya.

⁷ Prof. Dr. H. Winarno Surakhmad, M.Sc., Ed., "Pendidikan dan Peradaban Sedang Terancam", Rubrik Didaktika Kompas, 3 Juli 2000.

Paradoks Kebudayaan

Kekerasa primitif dan huru-hara massal akhir-akhir ini memunculkan kesan watak paradoks bangsa⁸. Bahwa bangsa ini selain penuh kelemahlembutan, pada saat yang bersamaan dapat menampilkan citra amuk massa dan kebrutalan. Peristiwa kekerasan yang berlarut-larut seperti bentrokan antar-etnis dan antar-umat beragama di berbagai tempat, menandakan masih rentannya pemahaman pluralitas dalam bangsa kita. Padahal berbilang puluhan tahun senantiasa didengungkan cita-cita persatuan dan kesatuan.

Namun sayangnya, pemimpin bangsa di waktu lalu sering menunjukkan perilaku paradoks antara yang mereka sampaikan di depan rakyat dan anak buahnya, dengan yang dilakukan. Jargon-jargon hidup sederhana, mengencangkan ikat pinggang dan prihatin mereka dengung-dengungkan, namun keluarganya hidup dalam kemewahan. Sikap paradoks inilah yang kemudian memancing kemarahan dan menurunkan kewibawaan serta menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kekuasaan.

Banyak kalangan yang menilai, munculnya kekerasan massa yang amat memalukan itu mencerminkan, betapa selama

ini kita telah mengabaikan kebudayaan. Adalah tepat, jika bangsa ini memulihkan kembali nilai-nilai yang diajarkan para pendiri bangsa dan memulai kembali usaha memperbaiki kebudayaan. Karena kita juga khawatir, bahwa simbol Garuda Pancasila hanya akan berhenti sebagai penanda (*signifier*) dan tidak pernah menjadi petanda (*signified*) yang bisa menjadi unsur perekat persatuan bangsa.

Seharusnya kita kembali pada semangat mereformasi diri, jika revolusi harus dihindari. Reformasi, sebenarnya bukan cita-cita yang baru. Dari zaman ke zaman, pemimpin etnik Jawa senantiasa mereformasi diri: Kerajaan Mataram Islam mereformasi Mataram Hindu, Proklamasi mereformasi kekuasaan kolonial, dan Orde Baru mereformasi Orde Lama, dan kini muncul zaman baru yang ingin mereformasi Order Baru.

Krisis Kebudayaan

Oleh sebab paradoks kebudayaan itulah yang kemudian menghasilkan krisis kebudayaan, di mana bangsa Indonesia sekarang ini seperti sudah kepayahan untuk bangkit segera. Ketika semula kita ingin mempercayai, bahwa krisis yang dialami tidak lain dari krisis moneter, se-

8 Dr. Ayu Soetarto, "Sarasehan Kebudayaan Seniman dan Budayawan", Rubrik Pendidikan & Kebudayaan Kompas, 20 April 1999.

gera kita diyakinkan, bahwa yang kita alami ternyata tidak lain adalah krisis kebudayaan. Sudah hampir tidak ada lagi nilai-nilai yang biasanya kita banggakan sebagai gambaran bangsa Indonesia yang halus, sopan, dan beradab yang tersisa, baik di lapisan rakyat maupun mereka yang mengaku sebagai pemimpin bangsa ini.

Sungguh mengejutkan melihat bahwa banyak di antara bangsa beradab ini, yang tampil memperlihatkan sosok "peradaban" yang sudah sukar disebut peradaban. Kebohongan, kepalsuan, dan kekejaman dalam skala besar yang sulit dipercaya, ternyata dilaksanakan oleh manusia Indonesia terhadap sesamanya, dan mencuat menjadi pengetahuan dunia, bahan pelajaran sejarah untuk generasi barikutnya. Sebuah tragedi kemanusiaan, memang!

Melalui sudut pandang yang lain, budayawan Mohamad Sobary menilai, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi kebudayaan lokal dan nasional yang patologis (sakit)⁹, akibat campur tangan kekuasaan di masa lalu. Cara pandang yang keliru terhadap kebudayaan yang diperlukan sebagai warisan, itu sama saja dengan me-

lecehkan kenyataan, bahwa kebudayaan masyarakat itu dinamis. Kebudayaan bukan merupakan warisan, karena di dalamnya ada *natural helping system* tanpa harus selalu ada campur tangan pemerintah.

Yang kita dapat pelajari dari realitas itu ialah, bahwa rupanya dasar kebudayaan nasional yang kita sangka kokoh-kuat, ternyata keropos. Yang kita dengan dari pemimpin masa lalu, bahwa kehidupan bangsa kita semakin solid, ternyata bahwa basis *interest* kekuasaan mereka yang semakin solid, bukannya basis kehidupan budaya dan peradaban bangsa. Mereka lupa, bahwa tidak ada peradaban yang dapat dibangun di atas kepalsuan, juga tidak di atas kekuasaan. Itulah sebabnya, sedikit saja keretakan akan mampu menghancurkanleburkan peradaban palsu. Dan, itulah yang harus kita jadikan pelajaran untuk masa depan.

Merusak peradaban, seperti terbukti dari pengalaman, ternyata dapat terjadi dengan lebih mudah dan dalam waktu yang singkat. Ketidakpedulian dan ketidakpekaan kita akan pentingnya membangun peradaban, sudah cukup untuk membuat peradaban terancam terpuruk.

9 Mohamad Sobary, "Peduli Budaya Lokal dan Pariwisata Nusantara", Seminar Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, 22 Juni 2000.

Kekerasan Massa

Budayawan Dr. Kuntowijoyo menengarai, masyarakat Indonesia yang dicitrakan sebagai masyarakat religius dan penuh sopan-santun tengah mengalami krisis kebudayaan dan patologis kebudayaan, yang pada gilirannya memunculkan kekuatan massa menggantikan negara. Fenomena ini tercermin dalam berbagai peristiwa kerusuhan, tawur massal, gerakan massa mahasiswa, serta bentrokan antarkelompok masyarakat dan antarmahasiswa yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia.¹⁰

Bertolak dari berbagai kerusuhan yang dilakukan massa untuk merusak dan menduduki suatu tempat, maka diperlukan suatu gerakan kebudayaan untuk mengembalikan kesadaran kemanusiaan. Agresivitas massa yang terjadi, disebabkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan perilaku. Gerakan kebudayaan yang dimaksud ialah gerakan kebudayaan untuk mengolah dimensi kedalaman manusia, yaitu sebuah transendensi, pendidikan moral, dan pengembangan estetika sebagai proses penyadaran. Tentu saja yang harus menjadi pemikiran kita

ialah, bagaimana "proyek" kebudayaan itu diimplementasikan.

Aksi kekerasan akhir-akhir ini disebabkan antara lain oleh adanya kebudayaan, yakni musnahnya "relasi-makna". Inilah gejala umum yang kini merambah kehidupan sosial kita. Setiap lapisan masyarakat merasa dirinya sebagai pihak yang paling benar dalam segala hal, sehingga mereduksi hal-hal lainnya. Sikap yang tak bisa dan tak mau menerima perbedaan itulah yang dimaksudkan sebagai fenomena kebudayaan yang telah kehilangan relasi-maknanya. Musnahnya relasi-makna itu menyebabkan bangsa ini telah kehilangan kepekaan sosialnya. Sementara *sense of morality* atas nilai-nilai kehidupan pun tak lagi dimiliki.¹¹

Dengan mau memaknai relasi-makna, artinya membangun pola hubungan antarmanusia yang bersandar pada pluralitas kebenaran. Ketika nilai kemanusiaan mulai luntur, jangan heran kalau kekerasan akan bicara sebagai satu-satunya cara menyelesaikan persoalan. Kini bangsa Indonesia membutuhkan paradigma baru untuk mengganti

10 Kuntowijoyo, "Kesadaran dan Perilaku", Simposium Ilmu-Ilmu Humaniora Ke-5, Tema "Krisis Kebudayaan, Kekuatan Massa Menggantikan Negara", Fakultas Astra UGM, Yogyakarta, 11 Desember 1998.

11 Tommy F. Awuy, "Kebudayaan sebagai Relasi-Makna", Seminar Membangun Kebudayaan Indonesia Menghadapi Milenium Ketiga, Universitas Nasional, Jakarta, 24 Agustus 1999.

yang lama, di mana relasi-makna bisa menjadi model paradigma baru.

Penutup

Pendidikan sebagai *Driving Force*

Dalam rangka merekat keutuhan dan kesatuan bangsa, memang peran pendidikan sangat menentukan. Melalui pendidikanlah, kita dapat berharap terwujudnya tujuan mencerdaskan bangsa. Kehidupan yang cerdas inilah yang patut menjadi dasar sebuah kebudayaan nasional yang kokoh dan sehat. Kalau ada faktor-faktor gesekan internal antarkomponen bangsa, maka pendidikan harus mengemuka sebagai kekuatan yang menjamin kerukunan, kesatuan, dan persatuan.

Pendidikan harus belajar dengan sadar dan berencana tampil sebagai kekuatan pembangun peradaban bangsa. Apu pun rumusan visi dan misi pendidikan nasional untuk masa depan, pendidikan tidak dapat lari dari tugas pokoknya untuk kembali memanusiakan manusia, membudayakan bangsa, dan meng-Indonesiakan seluruh anak bangsa!

Di masa lalu, pendidikan tidak pernah menyentuh persoalan itu secara wajar, karena posisi dan perannya telah mero-

sot menjadi alat kekuasaan, mengajarkan yang salah, mendidikan yang tidak manusiawi, dan dengan demikian, sejak itu telah berhenti menjadi kekuatan pendidikan yang sebenarnya. Sejak itu, pendidikan pun turut menjadi satu kepalsuan! Pendidikan telah menjadi bagian dari desintegrasi kebudayaan bangsa! Bagaimana mungkin pendidikan yang begitu, berpretensi dapat membangun kebudayaan bangsa yang besar?

Ketika bangsa-bangsa di dunia sedang berkemas-kemas memasuki masa depan, kita justru terjatuh dalam pertikaian yang merupakan konsekuensi masa lalu. Ketika bangsa-bangsa di dunia mendidik generasi muda, bersiap-siap menghadapi perubahan besar yang mensyaratkan kemampuan profesional yang kualitatif, pendidikan Indonesia masih saja mengajarkan *textbook thinking* yang kadaluwarsa, yang relevansinya untuk masa depan diragukan. Hal ini mempersempit kemampuan bangsa kita untuk bekerja sama, apalagi bersaing, dengan sesama generasi muda se dunia masa depan.

Pendidikan dapat menjadi *driving force* menumbuhkan kebudayaan nasional yang hidup di hati sanubari seluruh rakyat, karena benar-benar dapat berfungsi memberikan

identitas khas bagi jati diri bangsa Indonesia, wahana memperkuat solidaritas melalui pergulatan pengalaman sejarah, dan juga menjadi kebanggaan bersama secara nyata, karena bisa mewujudkan bangsa yang modern, maju dan mandiri.

Jika demikian, maka baik obseksi Koentjaraningrat maupun Sutan Takdir Alisjahbana ten-

tang kebudayaan nasional, akan benar-benar mampu menjadi perekat persatuan bangsa. Namun, apakah tantangan ini akan kita respons dengan cuma berpangku-tangan dan berpasrah diri?

Tentu saja jawaban dari pertanyaan ini menjadi pula kewajiban kita bersama.